



KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA LAYANAN DALAM IMPLEMENTASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Mochamad Farhan Tresna¹⁾; Winanda Setyaning Kridantika²⁾; Yudha Rahmat Ageng³⁾; Amrie Firmansyah^{4)*}

¹⁾ 4132210002_mochamad@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4132210028_winanda@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 4132210046_yudha@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*penulis korespondensi

Abstract

The Public Service Agency was formed to provide flexibility in financial management to government agencies based on economic principles, productivity and the application of sound business practices to improve services to the community. This study aims to review a public agency's financial performance and service performance by applying the Public Service Agency Financial Management Pattern (PPK-BLU). This study uses a qualitative method with a scoping review approach. The data in this study use journal articles that have discussed the implementation of PPK-BLU in various government agencies. The results of the research show that several agencies have an increase in financial performance and service performance. On the other hand, there are still several agencies whose performance did not experience the period before the implementation of the PPK-BLU, even below the established standards. This condition is thought to have occurred due to the management not being optimal in implementing regulations and management's lack of understanding of BLU management. Apart from that, some agencies lack proper planning to carry out their programs and activities with the PPK-BLU concept.

Keywords: Financial Performance, Public Service Agencies, Service Performance

Abstrak

Badan Layanan Umum dibentuk dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan kepada instansi pemerintah berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas kinerja keuangan dan kinerja layanan suatu instansi publik dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *scoping review*. Data dalam penelitian ini menggunakan artikel jurnal yang telah membahas implementasi PPK-BLU di berbagai instansi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa instansi yang memiliki peningkatan dalam kinerja keuangan dan kinerja pelayanan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa instansi yang tidak mengalami kinerjanya dengan periode sebelum penerapan PPK-BLU bahkan berada di bawah standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini diduga terjadi akibat pihak manajemen yang kurang optimal dalam melaksanakan peraturan dan kurangnya pemahaman manajemen terhadap pengelolaan BLU. Selain itu, terdapat juga instansi yang kurang memiliki perencanaan yang matang untuk melaksanakan program dan kegiatannya dengan konsep PPK-BLU.

Kata Kunci: Badan Layanan Umum, Kinerja Keuangan, Kinerja Layanan

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban negara adalah memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Pelayanan yang diberikan bertujuan untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat bahwa Indonesia berperan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, serta mendorong kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh negara bukan hanya sebatas kewajiban tanggung jawab. Namun, pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat harus memberikan *value added*, berkualitas dan menjunjung kesempurnaan.

Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau yang sering disebut juga pelayanan publik, memiliki beberapa permasalahan, khususnya terkait kualitas. Hal ini diperkuat dengan data kualitas kepuasan pelayanan publik yang masih relatif kalah jauh dari



pelayanan yang diberikan oleh swasta. Sebagai salah satu contoh adalah hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada pelayanan satu pintu Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang mendapatkan indeks dengan rata-rata masih pada skor 70-an (Kementerian LHK, 2022). Sebagai perbandingan lainnya, pelayanan rumah sakit Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir mendapatkan predikat baik namun dengan skor masih di bawah target yaitu 78.05, sedangkan tergetnya dengan skor 80 (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019).

Pelayanan publik tentu harus berkualitas, bahkan harus mampu bersaing dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Namun hal ini menjadi sulit karena perbedaan orientasi antara organisasi swasta dan organisasi publik. Organisasi swasta memiliki kepentingan komersial untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebesar mungkin. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi swasta berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik di antara para kompetitornya. Sementara itu, pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik tidak berorientasi pada profit, dan cenderung tidak memiliki pesaing. Pelayanan publik juga pada umumnya tidak mengenakan biaya kepada masyarakat sehingga terdapat kecenderungan untuk memberikan pelayanan seadanya.

Hal tersebut yang melatarbelakangi terbitnya aturan terkait pengelolaan keuangan khusus bagi satuan kerja Pemerintah khususnya satuan kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan terbitnya 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka pola pengelolaan keuangan khusus dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) diatur. Instansi BLU diharapkan mampu mendorong kualitas pelayanan atas capaian dari manajemen keuangan berbasis hasil kinerja pada organisasi pemerintah.

Perbedaan mendasar antara instansi BLU dan instansi satuan kerja (satker) non BLU adalah fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Satker BLU memiliki orientasi not-for-profit di mana tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, namun diperbolehkan mengelola pelayanan untuk mendapatkan surplus dan dapat langsung menggunakannya pada anggaran berikutnya. Namun demikian, BLU berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dalam operasionalnya masih terikat beberapa aturan. Contohnya adalah batas pengenaan tarif layanan yang diatur oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Satker BLU diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang bersaing, namun tetap mengedepankan kepentingan bersama, bukan untuk sebatas keuntungan semata. Oleh karena itu, BLU menjadi penting bagi perkembangan dan keberlangsungan instansi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Di Indonesia, BLU berkembang sejak tahun 2005 diawali dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sejak 2005 hingga triwulan I tahun 2020 perkembangan BLU di Indonesia sudah cukup pesat, yaitu 243 yang terdiri atas 105 BLU rumpun kesehatan, 100 BLU rumpun pendidikan, 10 BLU rumpun pengelola dana, 5 BLU pengelola kawasan, dan 23 BLU barang/jasa lainnya (Carolina, 2021). Terkait dengan perkembangan tersebut, yang menjadi isu berikutnya adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi yang berhasil dicapai oleh BLU tersebut. Apakah konsep value for money benar-benar sudah diterapkan dalam pelaksanaan dan operasional BLU, dan seberapa tinggi peningkatan pelayanan publik yang diberikan setelah adanya mekanisme BLU menjadi poin penting untuk dibahas dan diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perubahan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan



umum (PPK-BLU). Selain itu, penyebab berhasil dan kurang berhasilnya penerapan PPK-BLU juga akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena akan membahas rata-rata perkembangan beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar membahas perubahan kinerja keuangan dan/atau kinerja pelayanan pada satu BLU. Dengan demikian, ulasan perkembangan BLU secara lebih luas perlu untuk dilakukan.

Pembahasan terkait PPK-BLU dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur di bidang keuangan negara. Penelitian ini juga diharapkan menjadi benang merah penyebab optimal dan kurang optimalnya penerapan PPK-BLU, sehingga penelitian ini juga dapat dijadikan pertimbangan Pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait BLU. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pimpinan atau manajemen instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU agar lebih optimal dalam mengelola keuangan dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, BLU didefinisikan sebagai instansi pemerintah yang disiapkan untuk memberi pelayanan berupa barang dan/atau jasa kepada masyarakat dengan fleksibilitas tertentu dan merupakan badan nonprofit (Peraturan Pemerintah RI, 2005). Pola pengelolaan keuangan yang fleksibel ini berupa fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran, yang meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, serta pengadaan barang/jasa (Peraturan Pemerintah RI, 2005). Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mendorong BLU untuk dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan berkualitas. Untuk menjadi sebuah instansi yang dapat menerapkan PPK-BLU, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif merupakan persyaratan yang berkaitan dengan apakah instansi yang bersangkutan menyelenggarakan pelayanan yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan kawasan dan dana khusus untuk mengembangkan perekonomian kawasan dan masyarakat di sana. Persyaratan teknis meliputi kelayakan peningkatan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan jika instansi yang bersangkutan ditetapkan sebagai BLU (Peraturan Pemerintah RI, 2005). Sementara itu, beberapa dokumen dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan administratif, yang meliputi pernyataan kesanggupan meningkatkan pelayanan, keuangan dan manfaat untuk masyarakat, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir dan berkenan untuk diaudit secara independen (Peraturan Pemerintah RI, 2005). Hal yang terkait dengan persyaratan teknis kinerja keuangan dan kinerja pelayanan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2015 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya .

Terdapat dua aspek keuangan yang dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja BLU, yaitu rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU. Rasio keuangan tersebut merupakan pengukuran terhadap *cash ratio*, *current ratio*, *collecting period*, *fixed asset turnover*, *return on fixed asset*, *return on equity*, serta rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap biaya operasional. Kepatuhan pengelolaan keuangan BLU mencakup hal-hal seperti adanya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif, laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, penyampaian surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja



BLU, persetujuan tarif layanan, penetapan sistem akuntansi, persetujuan pembukaan rekening, penyusunan *standard operating procedures* (SOP) terkait pengelolaan kas, piutang, utang, pengadaan barang dan jasa, serta barang inventaris.

Terkait dengan kinerja pelayanan, tiap bidang BLU memiliki aspek yang berbeda-beda dalam mengukurnya. Untuk BLU bidang kesehatan, indikator yang digunakan adalah pertumbuhan produktivitas, efektivitas layanan, pertumbuhan pembelajaran, mutu pelayanan, mutu klinik, kepedulian kepada masyarakat, kepuasan pelanggan, dan kepedulian terhadap lingkungan. BLU bidang kesehatan menggunakan indikator, seperti akreditasi, prestasi, serta kepuasan pelanggan untuk menilai kinerja pelayanannya. Terkait aspek pelayanan BLU layanan lainnya meliputi pertumbuhan produktivitas layanan, efisiensi layanan, mutu dan manfaat kepada masyarakat, dan pengembangan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *scoping review* untuk melihat apakah instansi pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU mengalami peningkatan kinerja keuangan dan/atau kinerja pelayanan. *Scoping review* adalah teknik yang digunakan dalam melakukan identifikasi suatu kejadian tertentu yang sesuai dengan topik penelitian dengan menggunakan berbagai sumber literatur (Arksey & Malley, 2005). Penelitian ini mengambil data sekunder berupa 14 hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal, working paper dan skripsi yang diperoleh dari media online sesuai dengan topik yang akan dibahas.

Adapun langkah-langkah *scoping review* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pertanyaan yang menjadi topik penelitian, yaitu “Apakah instansi pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU mengalami peningkatan kinerja keuangan dan/atau kinerja pelayanan?”. Langkah selanjutnya adalah melakukan pencarian literatur dengan kata kunci: analisis kinerja keuangan dan pelayanan badan layanan umum serta implementasi PPK-BLU. Langkah berikutnya adalah melakukan seleksi literatur dan memetakan data yang diperoleh. Tahap terakhir dari *scoping review* ini adalah menyusun analisis berdasarkan hasil pemetaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penerapan PPK-BLU terhadap Kinerja Keuangan

Salah satu dampak yang dapat dirasakan dari penerapan PPK-BLU adalah dari sisi kinerja keuangan. Dari hasil revidu terhadap beberapa jurnal dan penelitian sebelumnya terdapat dampak positif terhadap kinerja keuangan instansi yang menerapkan PPK-BLU. Maharani et al. (2013) melakukan penelitian terkait analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan tahun perbandingan pada rentang tahun 2006 hingga 2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan pada Universitas Sebelas Maret yang dikukuhkan sebagai BLU pada tahun 2009 ini. Amallia (2015) melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan PPK-BLU dengan objek, yaitu Rumah Sakit Jiwa Prof. HB.Sa'anin pada periode 2010-2011 untuk sebelum menjadi BLU dan periode 2013-2013 setelah menjadi BLU. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan PPK-BLU belum memberikan dampak signifikan dalam kinerja keuangan BLU. Litaswari (2016) melakukan studi interpretatif terhadap Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta (BBKPM) yang menerapkan PPK-BLU. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan BBKPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, BBKPM Surakarta juga mengalami kendala terkait dengan keterlambatan dalam membuat laporan keuangan.



Suhendar & Nurhayati (2016) melakukan penelitian untuk mengulas perbedaan kinerja keuangan pada RSUD 45 Kuningan sebelum dan sesudah statusnya menjadi BLUD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan kinerja keuangan pada RSUD 45 Kuningan setelah status BLU ditetapkan. Julia & Sianturi (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan PPK-BLU terhadap kinerja finansial pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan PPK-BLU dapat meningkatkan kinerja keuangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Chrishartoyo et al. (2017) melakukan penelitian pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta terkait analisis kinerja keuangan serta non keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja keuangan setelah RSUD Dr. Moewardi Surakarta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Susandi et al. (2017) melakukan penelitian pada RSUD Kab. Klungkung terkait kinerja keuangan dan efisiensi proses internal sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan BLU. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan RSUD Kab. Klungkung baik sebelum maupun sesudah menerapkan PPK-BLU.

Wijayanti & Masdjojo (2017) melakukan penilaian kinerja keuangan RSUD Bendan Kota Pekalongan yang telah menerapkan PPK-BLU. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan RSUD Bendan berada di tingkat yang sedang karena terdapat beberapa rasio yang masih di bawah standar. Di samping itu, aspek kepatuhan pengelolaan keuangan juga belum mencapai skor minimal BLU. Qaiman et al. (2018) menyimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan BLU pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar mendorong peningkatan kinerja keuangan yang meliputi peningkatan nilai kerja, peningkatan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan kemandirian rumah sakit. Namun, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar masih mengalami kendala dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU seperti aturan pelaksanaan yang belum ada, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, serta belum dilakukannya evaluasi secara berkala oleh instansi pengelola teknis keuangan dan birokrasi pemerintahan. Efrina et al. (2019) melakukan penelitian pada BLU Universitas Jambi periode 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Universitas Jambi masuk dalam kategori cukup baik dan telah melewati batas target yang direncanakan. Namun terdapat keterbatasan dalam pengukuran kinerja keuangan Universitas Jambi, yaitu tidak memasukkan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional. Nuryanawati (2019) menyimpulkan bahwa penerapan PPK-BLU belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Syahromi & Cheisviyanny (2020) menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan kinerja keuangan pada Universitas Negeri Padang setelah penerapan PPK-BLU.

Maryana & Halim (2020) menyimpulkan bahwa penerapan PPK-BLU di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL) meningkatkan kinerja keuangan dan value for money. Auliya & Firmanto (2020) melakukan penelitian terhadap implementasi BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLUD pada SMK BLUD di Jawa Timur tidak meningkatkan kinerja keuangan sekolah. Namun, penerapan BLUD pada SMK membuat perencanaan dan penganggaran yang dilakukan lebih jelas dan terarah serta pelaporan dan pertanggungjawaban sekolah lebih transparan dan akuntabel.

Dampak Penerapan PPK-BLU terhadap Kinerja Layanan

Maharani et al. (2013) menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan peningkatan pelayanan yang signifikan setelah Universitas Sebelas Maret menerapkan PPK-BLU. Suhendar & Nurhayati (2016) menemukan bahwa terdapat peningkatan pelayanan pada RSUD 45 Kuningan. Julia & Sianturi (2016) menunjukkan bahwa penerapan PPK-BLU pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atau para *stakeholder*



terhadap pelayanan publik yang diberikan serta meningkatkan mutu layanan pendidikan. Chrishartoyo et al. (2017) menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan atas pelayanan RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLU. Susandi et al. (2017) menyimpulkan bahwa penerapan PPK-BLU belum memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kab. Klungkung. Efrina et al. (2019) menyimpulkan bahwa kinerja pelayanan Universitas Jambi mengalami peningkatan setelah adanya penetapan PPK-BLU. Nuryanawati (2019) menyimpulkan bahwa penerapan PPK-BLU belum dapat meningkatkan kinerja RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Auliya & Firmanto (2020) menyimpulkan bahwa implementasi BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur belum dapat meningkatkan kinerja pelayanan sekolah.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU mengalami peningkatan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan. Di samping itu, untuk beberapa instansi, penerapan PPK-BLU belum dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi antara lain pihak manajemen yang kurang optimal dalam melaksanakan peraturan yang diberikan dan kurangnya pemahaman manajemen terhadap pengelolaan BLU yang baru saja diterapkan. Selain itu, terdapat juga instansi yang kurang memiliki perencanaan yang matang untuk melaksanakan program dan kegiatannya serta tidak melakukan evaluasi untuk mempertahankan kinerja-kinerja yang telah berhasil sebelumnya. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja organisasi setelah PPK-BLU juga dipengaruhi faktor-faktor internal dalam organisasi tersebut khususnya terkait dengan penerapan tata kelola organisasi.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan dan kinerja pelayanan pada sebagian instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU di bidang pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya menunjukkan peningkatan. Namun, sebagian instansi menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan pada instansi yang telah menerapkan PPK-BLU.

Saran

Walaupun penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana perkembangan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan instansi pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU, namun ulasan dalam penelitian ini tergantung dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian kinerja keuangan dan kinerja layanan baik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada informan terkait, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih obyektif dan lebih komprehensif.

Penelitian ini menyarankan kepada Dewan Pengawas BLU untuk melakukan monitoring dan saran perbaikan atas BLU yang masih belum memiliki kinerja yang positif. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menelaah kebijakan atas implementasi PPK-BLU. Penelitian ini juga menyarankan kepada manajemen BLU untuk selalu mengoptimalkan kinerja organisasi sesuai dengan meningkatkan tata kelola dan strategi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amallia, C. (2015). *Analisis kinerja keuangan rumah sakit jiwa Prof. HB. Sa'anin sebelum dan setelah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah*. https://www.academia.edu/15347236/JURNAL_ANALISIS_KINERJA_KEUANGAN_RUMAH_SAKIT_JIWA_PROF_HB_SAAANIN_SEBELUM_DAN_SETELAH_DITETAPKAN_SEBAGAI_BADAN_LAYANAN_UMUM_DAERAH



- Arksey, H., & Malley, L. O. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Auliya, M. F., & Firmanto, Y. (2020). Implementasi badan layanan umum daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6712>
- Carolina, M. (2021). *Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) dan tantangan BLU tahun 2021*. [http://repositori.dpr.go.id/475/1/Analisis RUU 2020 Kijerja Badan layanan Umum dan Tantangan BLU.pdf](http://repositori.dpr.go.id/475/1/Analisis%20RUU%20Kinerja%20Badan%20Layanan%20Umum%20dan%20Tantangan%20BLU.pdf)
- Chrishartoyo, K. A., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Analisis kinerja keuangan dan non keuangan rumah sakit sebelum dan sesudah badan layanan umum daerah (studi kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2004-2015). *Probank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.36587/probank.v2i2.182>
- Efrina, L., Diah, E., & Aurora, T. (2019). Evaluasi kinerja keuangan dan pelayanan Universitas Jambi dalam penerapan pola keuangan badan layanan umum. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(3), 53–67. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i3.8137>
- Julia, T., & Sianturi, A. M. (2016). Pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) terhadap kinerja finansial, kinerja non finansial dan mutu layanan pendidikan (studi kasus pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.30656/jak.v3i1.201>
- Kementerian LHK. (2022). *Indeks kepuasan masyarakat Semester II tahun 2021*. http://pelayananinterpadu.menlhk.go.id/images/dokumen/pengumuman/LAPORAN_IKM_SMT2_TAHUN_2021.pdf
- Litaswari, I. (2016). *Studi interpretatif tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU) pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. [http://eprints.ums.ac.id/41253/28/03.HALAMAN JUDUL.pdf](http://eprints.ums.ac.id/41253/28/03.HALAMAN%20JUDUL.pdf)
- Maharani, A., Adi, W., & Muhtar, M. (2013). Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. *Jupe UNS*, 1(3), 1–10. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2565>
- Maryana, D., & Halim, D. N. (2020). Pengaruh penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum terhadap kinerja finansial (studi kasus: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 60–72. <https://ejournal.poltekpos.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/791>
- Nuryanawati, A. M. (2019). Evaluasi implementasi kebijakan badan layanan umum daerah di RSUD Dr. Soegiri Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(1), 921–936. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v4i1.217>
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2019). *Laporan survei indeks kepuasan masyarakat tahun 2019*. <https://rsmanambai.ntbprov.go.id/po-content/uploads/laporan-survei-indeks-kepuasan-pasien-2019.pdf>
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49441/pp-no-23-tahun-2005>
- Qaiman, B., Muspa, M., & Arman, A. (2018). Analisis implementasi pengelolaan keuangan badan layanan umum rumah sakit umum RSUP Dr. Wahidin Sudirohsodo Makassar. *Patria Artha Management Journal*, 2(1), 1–22. [10.33857/pamj.v2i1.106](https://doi.org/10.33857/pamj.v2i1.106)
- Suhendar, D., & Nurhayati, N. (2016). Analisis perubahan sistem keuangan dan kinerja rumah sakit sebelum dan sesudah berstatus badan layanan umum daerah (studi kasus pada RSUD 45 Kuningan). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(1), 1–8.



<https://doi.org/10.25134/jrka.v2i1.2382>

Susandi, N. T., Budiarta, K., & Suprasto, H. B. (2017). Kinerja keuangan dan efisiensi proses internal sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD pada RSUD Kab. Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2373–2396.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/26829>

Syahromi, M., & Cheisviyanny, C. (2020). Analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2839–2860. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.253>

Wijayanti, M. I., & Masdjojo, G. N. (2017). Evaluasi kinerja keuangan pada BLUD RSUD Benda Kota Pekalongan Tahun 2011-2015. *Telaah Manajemen*, 14(2), 1–12. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe5/article/view/6847>